SKRIPSI

KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

MARKUS DWI HARYANTO
NIM. E1031191071

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

MARKUS DWI HARYANTO
NIM. E1031191071

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Markus Dwi Haryanto
NIM. E1031191071

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama Tanggal:

Prof. Dr. H. Martoyo, MA
NIP. 196010031986031004

Dosen Pembimbing Pendamping Tanggal

Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 198805072014041002

HALAMAN PENGESAHAN

KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Oleh:

Markus Dwi Haryanto
NIM. E1031191071

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Selasa, 30 Juni 2026
Waktu	: 09.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Sidang FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. H. Martoyo, MA	Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP.196010031986031004	NIP.198805072014041002

Penguji Utama	Penguji Pendamping
Drs. Abdul Rahim, M.Si	Martinus, S.Sos, M.Si
NIP.196308111990021001 2	NIP.197212272006041002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Markus Dwi Haryanto NIM. E1031191071: Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pendidikan Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pendidikan Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*. Adapun hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis menunjukan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya koordinasi yang kurang efektif yaitu kurangnya kontribusi anggota dalam penyusunan dan penyampaian suatu agenda, keterlambatan penyampaian informasi, dan juga masih banyak nya pegawai yang tidak disiplin dan keluar pada saat jam kerja, namun dalam hal pembagian kerja sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor koordinasi menurut Hasibuan yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas dan disiplin. Saran dari penelitian ini yaitu dalam mewujudkan kesatuan tindakan sebaiknya dilakukan penjadwalan untuk mengatur pertemuan atau rapat agar mengurangi ketidakhadiran dari peserta rapat dan dalam penyampaian informasi seluruh bagian organisasi. Untuk meningkatkan kedisiplinan dari organisasi sebaiknya masing-masing pemimpin organisasi berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi untuk bersedia mengubah perilaku sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dari masing-masing anggota organisasi agar mentaati aturan yang berlaku oleh organisasi, cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mengubah alat absensi dari yang manual ke *fingerprint* sehingga data yang masuk tidak dapat dipalsukan dan absensi tersebut dilakukan dua kali dalam hitungan keseluruhan jumlah jam kerja.

Kata Kunci: Koordinasi, Pemerintah Daerah, Pendidikan

ABSTRACT

Markus Dwi Haryanto NIM. E1031191071: Regional Government Coordination in Education in Kapuas District, Sanggau Regency. Thesis. Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

This study aimed to identify and analyse the factors causing the coordination of the regional government in the education sector in Kapuas District of Sanggau Regency. This study employed a descriptive research type and a qualitative approach. The subject of this study was determined using the purposive technique. The results of this study revealed that several factors were causing less effective coordination, specifically the lack of member contributions in drafting and delivering an agenda, delays in information delivery, and also the high number of undisciplined employees who left during working hours. However, the division of labor was already quite good and in accordance with applicable regulations. This was influenced by the coordination factors according to Hasibuan, specifically unity of action, communication, division of labor, and discipline. Therefore, the researcher suggests that in achieving the unity of action, scheduling should be conducted to arrange meetings or assemblies to reduce absence among meeting participants and in the delivery of information across all parts of the organization. In improving the organisational discipline, each organisational leader should communicate with all organisation members to be willing to change behaviour as a way to raise awareness among individual members to obey the rules applied by the organisation. Another method that can be employed is changing the attendance system from manual to a fingerprint scanner so that the incoming data cannot be falsified, and this attendance log should be taken twice across the total calculation of working hours.

Keywords: Coordination, Regional Government, Education

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pendidikan Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau". Dengan fokus penelitian pada Faktor-faktor penyebab Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pendidikan Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab terjadinya Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pendidikan Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive* dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah Camat Kapuas, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, dan Kepala Koordinator Wilayah Kecamatan Kapuas.

Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2006, 88) mengatakan bahwa faktor-faktor mempengaruhi koordinasi yaitu sebagai berikut, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, disiplin. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya koordinasi yang kurang efektif yaitu kurangnya kontribusi anggota dalam penyusunan dan penyampaian suatu agenda, keterlambatan penyampaian informasi, dan juga masih banyak nya pegawai yang tidak disiplin dan keluar pada saat jam kerja, namun dalam hal pembagian kerja sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian ini saran-saran dari penulis yaitu sebaiknya dalam mewujudkan kesatuan tindakan sebaiknya dilakukan penjadwalan untuk mengatur pertemuan atau rapat agar mengurangi ketidakhadiran dari peserta rapat

dan dalam penyampaian informasi seluruh bagian organisasi. Untuk meningkatkan kedisiplinan dari organisasi sebaiknya masing-masing pemimpin organisasi berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi untuk bersedia mengubah perilaku sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dari masing-masing anggota organisasi agar mentaati aturan yang berlaku oleh organisasi, cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mengubah alat absensi dari yang manual ke *fingerprint* sehingga data yang masuk tidak dapat dipalsukan dan absensi tersebut dilakukan dua kali dalam hitungan keseluruhan jumlah jam kerja.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Markus Dwi Haryanto

NIM : E1031191071

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa, berdasarkan pengetahuan saya, skripsi ini tidak memuat karya maupun pendapat pihak lain kecuali yang telah disebutkan secara jelas dalam isi naskah serta tercantum pada daftar pustaka. Saya juga menegaskan bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil pekerjaan saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun untuk memperoleh gelar sarjana pada universitas atau perguruan tinggi mana pun.

Pontianak, 30 Juni 2026

Saya yang membuat pernyataan ini,



Markus Dwi Haryanto
NIM: E1031191071

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal,tetapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja”. (kutipan buku ‘Sebuah seni untuk bersikap bodo amat’ terjemahan Indonesia oleh Mark Manson)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Halaman persembahan ini ditujukan kepada setiap orang atau individu yang berjasa bagi penulis dalam menyelesaikan studinya terutama pada saat penulis menyusun skripsi. Dapat dikatakan juga bahwa halaman persembahan merupakan pernyataan berupa dedikasi untuk siapa hasil penelitian tersebut dipersembahkan. Adapun skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang sudah mendoakan, menasihati, serta mendukung anaknya ini lewat materi maupun non materi yang tentunya tidak dapat terhitung jumlahnya.
2. Saudara serta teman yang sudah mau membantu, serta memberi masukan dan mendukung saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pendidikan Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau".

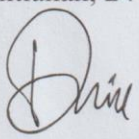
Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Dalam proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Dr. Herlan, S. Sos, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Prof. Dr. H. Martoyo, MA_selaku Pembimbing Utama, dan Bima Sujendra, S.IP, M.Si., M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kemudahan dalam memberi bimbingan, motivasi, dan arahan selama proses penulisan skripsi ini, baik mengenai metodologi penelitian, juga referensi literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
3. Drs. Abdul Rahim, M.Si selaku penguji utama, dan Martinus, S.Sos, M.Si selaku penguji kedua yang akan memberikan masukan demi kesempurnaan dalam skripsi ini.
4. Wakil Dekan, Bapak/Ibu dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

5. Seluruh mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis sehingga penyusunan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pontianak, 24 Juni 2026



Markus Dwi Haryanto
NIM.E1031191071

DAFTAR ISI

Judul……...i
Halaman Persetujuan……..ii
Halaman Pengesahan…….iii
Abstrak iv
Ringkasan Skripsi ix
Pernyataan Keaslian iv
Halaman Motto Dan Persembahan ix
Kata Pengantar x
Daftar Isi xii
Daftar Tabel xiv
Daftar Gambar xv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Fokus Penelitian 8
1.4 Rumusan Masalah 9
1.5 Tujuan Penelitian 9
1.6 Manfaat Penelitian 9
1.6.1 Manfaat Teoritis 9
1.6.2 Manfaat Praktis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Koordinasi 11
2.2.Pemerintah Daerah 23
2.3 Pendidikan 30
2.4 Hasil Penelitian Yang Relevan 32
2.5 Alur Pikir Penelitian 36
2.6 Pertanyaan Penelitian 37

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 38
3.2 Langkah Langkah Penelitian 39
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 40
3.3.1 Lokasi Penelitian 40
3.3.2 Waktu Penelitian 40
3.4 Subjek Dan Objek Penelitian 42
3.4.1 Subjek Penelitian 42
3.4.2 Objek Penelitian 43
3.5 Teknik Pengumpulan Data 43
3.6 Instrumen Pengumpulan Data 44
3.7 Analisis Data 29
3.8 Teknik Keabsahan Data 46

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 49
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sanggau 49
4.1.1 Keadaan Geografis 49
4.1.2. Keadaan Demografis 51
4.1.3. Keadaan Sosial Dan Ekonomi 53
4.1.4 Sarana Transportasi Dan Komunikasi 56
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kapuas 56
4.2.1 Keadaan Geografis 56
4.2.2 Keadaan Demografis 60
4.2.3 Keadaan Sosial Dan Ekonomi 61
4.2.4 Sarana Transportasi Dan Komunikasi 63
4.3 Profil Kantor Kecamatan Kapuas 64
4.3.1 Sejarah Umum Kantor Kecamatan Kapuas 64
4.3.2 Visi Dan Misi Kecamatan Kapuas 65
4.3.3 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Camat 66
4.4 Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 67
4.5 Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi
Kepala Koordinator Wilayah Kecamatan 68

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 69
5.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Koordinasi Pemerintah Daerah
Dalam Bidang Pendidikan Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 69
5.2 Kesatuan Tindakan Koordinasi Pemerintah Daerah 72
5.3 Proses Komunikasi Koordinasi Pemerintah Daerah 76
5.4 Pembagian Tugas Koordinasi Pemerintah Daerah 79
5.5 Sikap Disiplin Koordinasi Pemerintah Daerah 81

BAB VI PENUTUP 85
6.1 Kesimpulan 85
6.2 Saran 86
6.3 Implikasi 87
6.3.1 Implikasi Teoritis 87
6.3.2 Implikasi Praktis 88
6.4 Keterbatasan Penelitian 88
DAFTAR PUSTAKA 90

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Waktu Penelitian 41

4.1 Jumlah Dusun, Rt, Rw, Dan Luas Wilayah Per Desa/Kelurahan 58

4.2 Luas Wilayah 60

DAFTAR GAMBAR

2.1 Alur Pikir Penelitian 36

4.1 Peta Adminstrasi Kabupaten Sanggau 50

4.2 Peta Administrasi Kecamatan Kapuas 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mencapai kesatuan tindakan untuk pencapaian suatu tujuan dalam organisasi. Koordinasi adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik diantara individu dalam suatu organisasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Koordinasi itu penting dalam suatu organisasi, karena berhubungan dengan keefektifan organisasi dan unit-unit lainnya. Kebutuhan koordinasi akan muncul apabila satu orang atau kelompok dapat melaksanakan tugas dengan tanggung jawab sehingga tugas yang telah dikerjakan dapat terselesaikan sesuai dengan tujuan dan pencapaian organisasi. Koordinasi yang efektif antar bagian dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor penunjang yang penting terhadap suksesnya suatu organisasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi sehingga membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Dengan dikeluarkan nya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, hal ini diharapkan agar pemerintah daerah masing-masing dapat melakukan kreasi, inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, salah satunya pada bidang pendidikan.

Berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selain itu pendidikan merupakan salah satu jalan dalam meningkatkan sumberdaya manusia mengingat kemajuan suatu bangsa diukur berdasarkan kualitas sumber daya manusia, untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tersebut pendidikan merupakan sala satu faktor yang diyakini dapat menciptakan manusia yang produktif yang dapat memajukan bangsanya. Menurut Kunaryo (2000, 21) Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia, karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia yang produktif yang mampu memajukan bangsanya.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini diamanatkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan akses pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah secara maksimal. Hal tersebut mempertegas kewajiban pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang layak bagi masyarakat dalam mengenyam pendidikan seperti yang harus dicapai oleh pemerintah yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mecerdaskan kehidupan bangsa.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan desentralisasi atau pemerataan adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia yaitu pendidik

dan tenaga kependidikan, sumber daya keuangan, perlengkapan yang menunjang kelancaran dalam pelaksanaan desentralisasi pemdidikan. Selain itu, keberhasilan dari pemerataan pendidikan disuatu daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia yang nanti berperan sebagai pemimpin, manajer, staf dan pelaksana pendidikan yang berwenang dan bertanggung jawab membangun infrastruktur pendidikan di daerah tersebut. Permasalahan utama pendidikan tidak hanya terdapat pada pengembangan kapasitas tetapi lebih kepada penyebaran secara merata pendidik dan tenaga kependidikan tersebut ke seluruh daerah.

Kabupaten Sanggau memiliki program *Seven Brand Images* yang mana *Seven Brand Images* merupakan rangkuman cita-cita program kerja menuju "Sanggau Maju dan Terdepan". *Seven Brand Images* ini tertuang dalam SK Bupati nomor 12 tahun 2015 tentang penetapan logo *Seven Brand Images* dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019. Adapun penjelasan mengenai *Seven Brand Images* ini adalah :

1. Sanggau Pintar, yang berarti bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau akan mendapatkan jangkauan pendidikan yang layak dengan didukung ketersediaan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.
2. Sanggau Sehat, yang berarti bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau dapat menikmati jangkauan pelayanan kesehatan yang sama.

3. Sanggau Bersih dan Indah, yang berarti bahwa meningkatnya tata kelola kebersihan dan keindahan lingkungan di perkotaan, kecamatan dan perdesaan.
4. Sanggau Tertib, yang berarti bahwa meningkatnya kedisiplinan, ketaatan dan kesadaran aparatur pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan.
5. Sanggau Terang, yang berarti bahwa terpenuhinya kebutuhan akan ketersediaan sumber penerangan (listrik) baik untuk masyarakat perkotaan maupun perdesaan.
6. Sanggau Manjur (Maju Infrastruktur), yang berarti bahwa agar tersedianya infrastruktur yang memadai dengan melakukan pembenahan dan peningkatan infrastruktur.
7. Sanggau Budiman (Berbudaya dan Beriman), yang berarti bahwa terwujudnya masyarakat Kabupaten Sanggau yang bangga akan adat istiadat dan kebudayaannya serta terjalinnya kehidupan umat beragama yang rukun, damai, toleran dengan didukung pembinaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika melalui pembinaan terhadap umat beragama dan penyediaan sarana dan prasarana ibadah yang lebih baik.

Berdasarkan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau terdapat *7 brand images* yang menjadi program kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Namun fakta nya salah satu

program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau yaitu Sanggau Pintar belum mendapatkan hasil yang diinginkan melalui program tersebut terbukti dengan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau masih belum tercapai dan terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau, tentunya pelaksanaan salah satu program pemerintah daerah yaitu Sanggau Pintar dijalankan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan selaku pihak yang bertanggung jawab pada bidang pendidikan yang ada di Kabupaten Sanggau.

Belum meratanya pemerataan guru di Kabupaten Sanggau di SDN 70 Sanggau Permai Kelurahan Sungai Sengkuang, terdapat 12 orang guru yang hanya mengajar 22 siswa dari kelas I hingga kelas VI, kelas I terdiri dari 0 siswa, kelas II 2 orang siswa, kelas III 2 siswa, kelas IV 8 siswa, kelas V 5 siswa dan kelas VI 5 siswa. Fakta lain yaitu di SDN Doku yang juga berada di kelurahan yang sama siswanya hanya 53 orang, namun jumlah guru mengajar di sekolah sebanyak 11 orang, di beberapa sekolah di Kecamatan Kapuasgurunya masih ada di bawah 4 orang contohnya di SDN 34 Batang Tarang jumlah guru hanya 3 orang, di SDN Nanga Biang 4 orang dan siswanya kurang lebih dari 200 orang begitu pula di SDN 19 Jonti siswanya kurang lebih 200 orang tetapi hanya diajar oleh 4 orang guru.

Bila dibandingkan antara jumlah siswa dengan jumlah tenaga guru di Kabupaten Sanggau, maka sebenarnya jumlah guru dengan siswa yang didik cukup memadai. Dikatakan demikian karena untuk satu orang guru itu idealnya dalam melayani siswa 6-20 orang sedangkan di Kabupaten Sanggau 1-8. Permasalahannya adalah penyebaran guru (tenaga pendidik) yang tidak merata sehingga masih banyak sekolah yang kekurangan guru karena banyak guru yang

menumpuk di daerah kota dan kabupaten. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak adanya pemerataan guru di Kabupaten Sanggau yang dibuktikan oleh jumlah guru mengajar tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut.

Untuk sarana prasarana di Kecamatan Kapuas masih belum cukup merata, SD sudah cukup merata dan SMP hanya terpusat di kota namun di wilayah desa masih kurang sehingga masih butuh pertimbangan yang lebih matang dengan pihak pemda. Terkait kesediaan jumlah personil guru, tentu pihak Kecamatan Kapuas masih kekurangan guru baik guru PNS, ataupun honorer karena jumlah gaji/upah yang dinilai tidak sesuai dengan transportasi ke kampung yang ditugaskan, hal tersebut berpengaruh pada kualitas pendidikan di Kecamatan Kapuas. Fakta lain adanya perbedaan pendapat oleh pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan koordinator wilayah Kecamatan Kapuas yang disebabkan kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak, banyak hal yang melatarbelakangi perbedaan informasi terkait dengan keberhasilan pemerataan pendidikan di Kecamatan Kapuas salah satunya tentang penyediaan personil tenaga pengajar, hal tersebut berdampak pada persebaran dan kelengkapan sarana prasarana dalam kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan pernyataan dari Bupati Sanggau dilansir pada portal media online kabar.sanggau.go.id menyatakan bahwa mengungkapkan soal kondisi pendidikan di Kabupaten Sanggau pada acara pelantikan Ketua TP PKK dan Bunda PAUD kecamatan, soal kondisi pendidikan di Kabupaten Sanggau pada acara pelantikan Ketua TP PKK dan Bunda PAUD kecamatan. Angka putus sekolah di Kabupaten Sanggau sangat tinggi apabila dibandingkan dengan tahun lalu, pada

tahun 2024 memiliki angka tertinggi dan kemudian mencapai angka 100 dan masuk kategori rawan dan pertahun di Kabupaten Sanggau angka putus sekolah lebih dari 100 untuk semua tingkatan baik SD, SMP DAN SMA sederajat. Data yang dilansir dari sensus penduduk 2025 oleh badan pusat statistik Kabupaten Sanggau angka anak putus sekolah tahun diatas 100 anak, jenjang SD ada 197 anak, SMP ada 372 anak dan SMA sebanyak 174 anak. Sementara saat ini, angka putus sekolah lebih rendah, yakni SD ada 19 anak, SMP ada 15 anak, dan SMA ada 43 anak. Beliau mengatakan hal tersebut berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sanggau yang rendah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai koordinasi instansi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam bidang pendidikan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat dilakukan identifikasi masalah penelitian yang berkaitan dengan latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Masih kurang efektifnya koordinasi yang dilakukan dalam bidang pendidikan.
2. Kurang tercapainya pemerataan guru di wilayah Kecamatan Kapuasyang tidak sesuai dengan cita-cita program kerja pemda sanggau.

3. Kurangnya informasi dalam pendataan jumlah sarana prasarana pendidikan.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya terdapat permasalahan, berkaitan dengan hal tersebut untuk mempersempit ruang lingkup masalah agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah diharapakan, maka fokus penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan koordinasi pemerintah daerah dalam bidang pendidikan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau kurang efektif.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, agar penelitian memiliki arah yang jelas, terlebih dahulu harus dirumuskan masalah nya. Penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang menyebabkan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau terkait dalam bidang pendidikan kurang efektif ?.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam bidang pendidikan yang kurang efektif.

1.6. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian tentang Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pendidikan Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, akan diperoleh manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi sebagai penerapan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dengan ilmu pemerintahan, secara khusus konsep-konsep yang berkaitan dengan koordinasi pemerintah daerah, dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perbandingan antara realita dan teori yang berlaku.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dapat dijadikan suatu saran pemikiran terhadap instansi terkait yang berada di wilayah Kabupaten Sanggau dalam menjalankan fungsi nya, serta sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam memahami masalah yang ada, dalam memberikan arahan terhadap pegawai. Selain itu menjadi suatu bahan untuk evaluasi kerja agar dapat menangani tugas dan pekerjaan dengan baik sesuai dengan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan.